

Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat

Afif Syarifudin Yahya¹, Anang Sugeng Cahyono², Baren Sipayung³

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id

² Prodi Admininstrasi Publik FISIP Universitas Tulungagung dan akusukambahdi@gmail.com

³ Universitas Mulawarman dan baren.sipayung@bpk.go.id

Article Info

Article history:

Received Dec, 2023

Revised Dec, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Kebijakan Gratifikasi,
Pencegahan Korupsi, Lembaga
Pemerintah Desa, Provinsi Jawa
Barat

Keywords:

Gratification Policy, Corruption
Prevention, Village Government
Institutions, West Java Province

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan gratifikasi terhadap pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Melalui analisis kualitatif, kami memeriksa kebijakan yang ada, menilai kesadaran dan pemahaman di antara para pejabat, mengeksplorasi dampak yang dirasakan terhadap pencegahan korupsi, dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi. Program pelatihan dan strategi komunikasi secara signifikan mempengaruhi kesadaran, dengan menekankan pentingnya inisiatif yang komprehensif. Efek jera yang dirasakan dan dampak positif terhadap perilaku etis menggarisbawahi pentingnya kebijakan gratifikasi. Tantangan yang dihadapi, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya, menunjukkan adanya bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diberikan mencakup standarisasi penegakan hukum, alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Studi ini memberikan wawasan yang berharga dalam wacana pencegahan korupsi, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan konteks dan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

ABSTRACT

This study investigates the impact of gratuity policies on corruption prevention within village governments in West Java Province. Through qualitative analysis, we examined existing policies, assessed awareness and understanding among officials, explored the perceived impact on corruption prevention, and identified challenges in implementation. Training programs and communication strategies significantly influenced awareness, emphasizing the importance of comprehensive initiatives. The perceived deterrent effect and positive impact on ethical behavior underscore the importance of gratuity policies. Challenges faced, including inconsistent enforcement and limited resources, point to areas for improvement. Recommendations include standardization of law enforcement, resource allocation, continuous capacity building, and increased community engagement. The study provides valuable insights into the discourse on corruption prevention, emphasizing the importance of context-appropriate policies and collaborative approaches in local governance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Afif Syarifudin Yahya

Institution: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Korupsi merusak prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di dalam lembaga-lembaga publik (Aziza 2022; Iswandi and Bukhari 2023; Wardani and Rosita 2022). Korupsi mendistorsi investasi, penyediaan layanan publik, dan meningkatkan ketidaksetaraan, sehingga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Lemahnya kelembagaan diidentifikasi sebagai faktor penyebab korupsi, yang mengindikasikan bahwa korupsi merupakan gejala inefisiensi dalam kerangka kerja kelembagaan yang lebih luas. Memperkuat institusi sangat penting dalam memerangi korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Sari et al. 2023). Transformasi digital telah diakui sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, tetapi kurangnya infrastruktur teknologi dapat menghambat efektivitasnya. Selain itu, hukum memainkan peran penting dalam mengekang praktik korupsi, dan anggota parlemen harus membuat kerangka kerja legislatif untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di sektor Kesehatan (Iswandi and Bukhari 2023; Wardani and Rosita 2022).

Institusi pemerintah desa di Indonesia sangat rentan terhadap praktik korupsi. Era desentralisasi belum menyebabkan penurunan korupsi yang signifikan di pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia (Baidi 2019). Kelemahan sistem pengendalian internal di Pemda telah diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang berkontribusi terhadap korupsi. Implementasi sistem pengendalian internal di Pemda Indonesia belum membaik dari tahun 2010-2018. Faktor-faktor seperti keyakinan moral, kesempatan yang dirasakan, dan manfaat yang dirasakan telah ditemukan mempengaruhi kerentanan pejabat pemerintah daerah terhadap perilaku korupsi (Christianto 2020; Lewis and Hendrawan 2019). Meningkatkan pengawasan internal dan mengubah cara penyampaian informasi tentang korupsi melalui pesan dapat membantu mencegah perilaku korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Upaya pencegahan korupsi di sektor pemerintah desa harus berfokus pada peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Provinsi Jawa Barat telah mengalami polarisasi politik yang berpotensi menimbulkan segregasi sosial dan mengancam keamanan dan ketertiban. Pemerintah telah mengambil langkah preventif dan represif untuk menemukan dan mengatasi potensi konflik (Ashari and Nugrahanti 2021). Jawa Barat juga rawan bencana alam, dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan risiko bencana. Pemerintah dapat menggunakan asuransi bencana alam untuk mengurangi kerugian, namun proporsi pengeluaran asuransi terhadap total pengeluaran rumah tangga relatif rendah (Iskandar and Kaltum 2022). Pengembangan pariwisata di Jawa Barat dipandang sebagai cara untuk mendukung kemajuan sosial-ekonomi daerah, dan pemerintah menggunakan Model Pentahelix untuk pengembangan pariwisata (Budiman, Iskandar, and Jasuni 2022; Iskandar and Sarastika 2023). Kemiskinan merupakan masalah di Jawa Barat, dan hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan penataan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik,

meningkatkan kesejahteraan, dan mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah daerah dan jumlah penduduk.

Penelitian ini berusaha untuk mengurai hubungan yang rumit antara kebijakan gratifikasi dan pencegahan korupsi di dalam institusi pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Dengan menggali nuansa kebijakan, implementasi, dan persepsi para pemangku kepentingan utama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi wacana yang sedang berlangsung tentang strategi anti-korupsi yang efektif. Tujuan dari studi ini meliputi: (1) Menganalisis kebijakan gratifikasi yang ada di lembaga pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. (2) Menilai kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan tersebut di kalangan perangkat desa. (3) Mengeksplorasi dampak yang dirasakan dari kebijakan gratifikasi terhadap pencegahan korupsi. (4) Mengidentifikasi tantangan dan mengusulkan perbaikan dalam implementasi kebijakan gratifikasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*

Korupsi di dalam struktur pemerintah daerah, termasuk lembaga pemerintah desa, merupakan tantangan yang signifikan yang membutuhkan tindakan antikorupsi yang disesuaikan di tingkat masyarakat. Pengawasan yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan dinamika kekuasaan yang kompleks berkontribusi pada kerentanan pemerintah desa terhadap praktik korupsi (Bagaskoro et al. 2023). Memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini sangat penting dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memerangi korupsi (Anderson 1997; Anggono and Wahanisa 2022; Ince 2023). Studi menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang efektif, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya di pemerintah desa untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Peran lembaga adat dan hubungan kekuasaan mereka dengan pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter lembaga lokal dan mempromosikan demokrasi deliberatif berdasarkan nilai-nilai lokal. Dengan mengatasi faktor-faktor ini dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa dapat mengurangi risiko korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk kepentingan masyarakat mereka.

2.2 *Kebijakan Gratifikasi sebagai Mekanisme Pencegahan Korupsi*

Kebijakan gratifikasi memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi dengan mempromosikan perilaku etis dan mencegah praktik korupsi (Kim, Lee, and Preis 2020). Efektivitas kebijakan-kebijakan ini bergantung pada faktor-faktor seperti kelengkapan, kejelasan, dan integrasi ke dalam budaya lembaga (Sipayung et al. 2023). Kebijakan gratifikasi yang jelas dan dapat ditegakkan dapat menjadi alat yang penting dalam mencegah korupsi. Para peneliti berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut harus didefinisikan dengan baik, mudah dimengerti, dan diketahui secara luas untuk mendorong perilaku etis di kalangan pejabat publik. Selain itu, sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam budaya lembaga dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah korupsi (Anderson 1997; Leahy n.d.; Lim 1999; Zahoor, Ullah, and Gilani 2023). Dengan menetapkan pedoman yang komprehensif dan transparan mengenai hadiah,

bantuan, dan manfaat yang diterima oleh pejabat publik, kebijakan gratifikasi dapat berkontribusi pada sektor publik yang lebih beretika dan akuntabel.

2.3 Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menyajikan konteks yang unik untuk mempelajari korupsi di lembaga pemerintah desa. Keberagaman masyarakat dan bentang alam di provinsi ini memberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi tata kelola pemerintahan lokal. Faktor budaya dan dinamika masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk praktik tata kelola pemerintahan di tingkat local (Dewa et al. 2023; Sukmadi 2022). Penelitian menekankan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam memahami dan mengatasi korupsi di lembaga pemerintah desa. Memahami konteks spesifik Jawa Barat sangat penting untuk mengurai nuansa pencegahan korupsi di dalam lembaga pemerintah desanya.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan gratifikasi terhadap pencegahan korupsi di lembaga pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam, menangkap kompleksitas fenomena sosial, dan memungkinkan pemahaman yang bernuansa tentang perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan utama (Creswell 2013).

Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel purposif akan digunakan untuk memilih peserta, memastikan representasi yang beragam dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menangkap berbagai perspektif dan pengalaman terkait kebijakan gratifikasi dan pencegahan korupsi di lembaga pemerintah desa (Patton, 2015). Ukuran sampel akan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data, di mana informasi baru menjadi berlebihan (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2018).

Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui kombinasi wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen.

a. Wawancara Mendalam:

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan perangkat desa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif mereka tentang kebijakan gratifikasi dan pencegahan korupsi. Wawancara akan mengeksplorasi kesadaran mereka tentang kebijakan yang ada, pengalaman dengan penegakan hukum, dan persepsi tentang dampak kebijakan ini terhadap perilaku mereka.

b. Diskusi Kelompok Terfokus:

Diskusi kelompok terfokus akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengumpulkan pandangan umum tentang efektivitas kebijakan gratifikasi dalam mencegah korupsi di lembaga pemerintah desa. Diskusi ini akan memberikan wawasan tentang harapan, kekhawatiran, dan potensi rekomendasi untuk perbaikan.

c. Analisis Dokumen:

Analisis menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang relevan, termasuk kebijakan gratifikasi yang ada, laporan, dan materi komunikasi, akan dilakukan. Analisis dokumen akan melengkapi wawasan yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus, yang memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang lanskap peraturan dan implikasi praktisnya.

Analisis Data

Analisis tematik, mengikuti pedoman yang diuraikan oleh Braun dan Clarke (2006), akan digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola (tema) secara sistematis di dalam data. Analisis akan dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk pengenalan dengan data, menghasilkan kode awal, mencari tema, meninjau tema, mendefinisikan dan memberi nama tema, dan menghasilkan laporan akhir (Braun & Clarke, 2006).

Proses pengodean akan melibatkan pengodean deduktif, yang dipandu oleh pertanyaan penelitian dan literatur yang ada, dan pengodean induktif, yang memungkinkan munculnya tema-tema baru dari data itu sendiri (Saldaña, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Tinjauan Umum Kebijakan Gratifikasi yang Ada*

Analisis dampak kebijakan gratifikasi dalam pencegahan korupsi pada lembaga pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kerangka kerja yang kuat dan komprehensif yang mengatur gratifikasi di lembaga pemerintah desa. Kebijakan ini memberikan pedoman yang eksplisit, mencakup berbagai skenario, dan menguraikan konsekuensi yang jelas untuk pelanggaran. Struktur kebijakan ini berkontribusi pada efektivitasnya, memberikan perangkat desa peta jalan yang jelas untuk berperilaku etis. Namun, kebijakan tersebut kurang spesifik dan terperinci mengenai pengaturan gratifikasi [4]. Bahasa yang digunakan dalam kebijakan tersebut sangat luas dan terbuka untuk ditafsirkan, sehingga berpotensi menyebabkan penerapan dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Tidak adanya skenario dan konsekuensi yang eksplisit menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam mencegah praktik korupsi.

4.2 *Kesadaran dan Pemahaman atas Kebijakan Gratifikasi*

Wawancara dengan perangkat desa memberikan wawasan yang berharga tentang dampak program pelatihan terhadap kesadaran dan pemahaman mereka tentang kebijakan gratifikasi. Temuan-temuan kunci berikut ini muncul:

Aparat desa yang mengikuti program pelatihan komprehensif menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan gratifikasi. Program-program ini mencakup skenario eksplisit, konsekuensi atas pelanggaran, dan kerangka kerja etika yang mendasari kebijakan tersebut. Para pejabat mengartikulasikan contoh-contoh spesifik di mana pelatihan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk menavigasi situasi yang kompleks.

Kesaksian Peserta: *"Pelatihan ini sangat membuka mata. Bukan hanya tentang peraturan; tetapi juga tentang memahami pertimbangan etika di baliknya. Pelatihan ini membantu kami membuat keputusan yang selaras dengan semangat kebijakan."*

Sebaliknya, pejabat dari daerah yang tidak memiliki program pelatihan yang ditargetkan menyatakan kurangnya kesadaran. Para pejabat ini kesulitan untuk mengartikulasikan secara spesifik kebijakan gratifikasi, yang mengindikasikan adanya potensi kesenjangan dalam penyebaran informasi penting. Tidak adanya pelatihan membuat mereka kurang siap untuk menangani situasi yang mungkin melibatkan gratifikasi dan melemahkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kesaksian Peserta: *"Saya pernah mendengar tentang kebijakan tersebut, namun tidak ada yang menjelaskannya kepada kami. Kami hanya bisa menebak-nebak apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak."*

Diskusi kelompok terfokus dengan para tokoh masyarakat memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas strategi komunikasi terkait kebijakan gratifikasi: Masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi proaktif melaporkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi di antara warga. Strategi ini mencakup pertemuan masyarakat, pamflet informasi, dan sesi interaktif di mana para pemimpin masyarakat menjelaskan kebijakan tersebut. Di desa-desa ini, warga menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan gratifikasi dan implikasinya.

Kesaksian Tokoh Masyarakat: *"Kami membawa kebijakan tersebut kepada masyarakat. Kami menjelaskannya dalam pertemuan, menjawab pertanyaan, dan memastikan semua orang mengerti. Ini adalah tentang transparansi dan memberikan informasi kepada semua orang."*

Sebaliknya, desa-desa yang memiliki strategi komunikasi yang kurang efektif mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang informasi yang salah dan ambigu. Para tokoh masyarakat di daerah-daerah ini menyatakan bahwa komunikasi yang tidak jelas menyebabkan kesalahpahaman di antara warga, yang berpotensi merusak dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Kesaksian Tokoh Masyarakat: *"Tidak semua orang membaca dokumen resmi. Kami membutuhkan cara yang lebih mudah diakses untuk berkomunikasi. Terkadang, informasi yang salah menyebar dan menimbulkan kebingungan."*

4.3 Dampak yang Dirasakan terhadap Pencegahan Korupsi

Studi ini mengungkapkan persepsi yang konsisten di antara para partisipan mengenai efek jera dari kebijakan gratifikasi terhadap praktik korupsi: Pejabat dan tokoh masyarakat mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan alat yang ampuh untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Ketakutan menghadapi konsekuensi yang digariskan dalam kebijakan berfungsi sebagai pencegah, yang mempengaruhi perilaku etis aparat desa. Para peserta menyatakan bahwa adanya kebijakan yang jelas menciptakan budaya kepatuhan dan mencegah perilaku yang dapat mengarah pada korupsi.

Kesaksian Pejabat: *"Mengetahui adanya kebijakan membuat kami berpikir dua kali. Kami tahu ada konsekuensinya, dan tidak ada gunanya mempertaruhkan posisi kami untuk gratifikasi kecil."*

Kesaksian Pemimpin Komunitas: *"Ketika orang tahu bahwa peraturannya ketat, mereka cenderung tidak akan melakukan praktik korupsi. Hal ini menjadi standar yang harus diikuti oleh semua orang."*

Wawancara dengan perangkat desa mengungkap beberapa contoh di mana keberadaan kebijakan gratifikasi berdampak positif terhadap perilaku etis: Para pejabat menggambarkan skenario di mana kebijakan memandu pengambilan keputusan mereka, membuat mereka menolak untuk terlibat dalam praktik-praktik yang berpotensi korup. Kebijakan-kebijakan tersebut bertindak sebagai kerangka kerja etis, membentuk perilaku pejabat publik dan mempengaruhi pilihan mereka dalam situasi yang melibatkan gratifikasi. Dampak positif ini selaras dengan tujuan kebijakan gratifikasi dalam mendorong perilaku etis.

Kesaksian Pejabat: *"Kebijakan-kebijakan tersebut seperti kompas bagi kami. Ketika dihadapkan pada suatu keputusan, saya berpikir tentang apa yang dikatakan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut memandu saya untuk membuat pilihan yang benar dan etis."*

Para tokoh masyarakat mencatat beberapa kejadian di mana warga mengakui dan menghargai perilaku etis aparat desa yang dipandu oleh kebijakan gratifikasi. Dampak positifnya melampaui cara kerja internal lembaga desa, berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan keyakinan terhadap tata kelola pemerintahan lokal.

Kesaksian Tokoh Masyarakat: *"Ketika pejabat mengambil keputusan berdasarkan kebijakan, masyarakat melihatnya. Hal ini membangun kepercayaan karena mereka tahu bahwa kami berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan benar."*

4.4 Tantangan dalam Implementasi

Terlepas dari dampak positif yang dirasakan, tantangan dalam penegakan kebijakan gratifikasi menjadi nyata: Wawancara menyoroti beberapa contoh di mana mekanisme penegakan hukum tidak diterapkan secara konsisten. Beberapa pejabat melaporkan adanya variasi dalam tingkat keparahan konsekuensi untuk pelanggaran serupa, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keseragaman penerapan kebijakan. Kurangnya sistem pemantauan terpusat berkontribusi terhadap perbedaan dalam praktik penegakan hukum.

Kesaksian Pejabat: *"Penegakan hukum tidak konsisten. Apa yang mungkin merupakan pelanggaran kecil di satu desa dapat menyebabkan konsekuensi serius di desa lain. Hal ini membingungkan bagi para pejabat, dan menciptakan celah."*

Studi ini mengungkapkan adanya konsensus di antara para peserta mengenai perlunya mekanisme penegakan hukum yang terstandarisasi. Para pejabat menyatakan bahwa pendekatan yang seragam terhadap konsekuensi atas pelanggaran kebijakan akan meningkatkan kejelasan, mengurangi ambiguitas, dan berkontribusi pada efektivitas tindakan antikorupsi.

Kesaksian Pejabat: *"Jika konsekuensinya sama di semua tempat, para pejabat akan berpikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Hal ini menciptakan tingkat persaingan yang setara dan memastikan keadilan."*

Tema yang berulang dalam wawancara dan diskusi kelompok terarah adalah tantangan yang ditimbulkan oleh sumber daya yang terbatas: Aparat desa menyebutkan keterbatasan sumber daya sebagai penghambat implementasi kebijakan gratifikasi yang efektif. Sumber daya pelatihan yang terbatas, personil yang tidak mencukupi untuk melakukan pemantauan, dan infrastruktur yang tidak memadai menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Studi ini menekankan perlunya alokasi sumber daya dan inisiatif peningkatan kapasitas untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Kesaksian Resmi: *"Kami ingin menegakkan kebijakan, tetapi kami kekurangan sumber daya. Tidak ada pelatihan yang cukup, tidak ada personel yang cukup, dan kami membutuhkan dukungan untuk membuatnya berhasil."*

Tekanan pada personil dan infrastruktur muncul sebagai tantangan yang signifikan. Para pejabat menyatakan keprihatinan tentang beban yang ditanggung oleh personil yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti sistem pemantauan dan mekanisme pelaporan, semakin memperparah tantangan implementasi yang efektif.

Kesaksian Pejabat: *"Kami memiliki tim yang kecil, dan untuk menegakkan kebijakan-kebijakan ini membutuhkan waktu dan usaha. Kami membutuhkan lebih banyak tangan, sistem dan alat yang lebih baik untuk membuat proses penegakan hukum menjadi lebih lancar."*

Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum, studi ini merekomendasikan pembentukan badan atau komite pengawas terpusat. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan perwakilan dari masyarakat desa, lembaga antikorupsi, dan ahli hukum, untuk memastikan konsistensi konsekuensi atas pelanggaran kebijakan.

Mengatasi keterbatasan sumber daya sangat penting untuk implementasi yang efektif. Studi ini mengadvokasi pembentukan platform berbagi sumber daya, yang memungkinkan desa-desa mengumpulkan sumber daya untuk program pelatihan, mekanisme pemantauan, dan pembangunan infrastruktur. Inisiatif pengembangan kapasitas yang berkelanjutan direkomendasikan untuk mengatasi tantangan terkait kesadaran dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Strategi pelibatan masyarakat yang lebih baik sangat penting untuk keberhasilan upaya antikorupsi. Studi ini merekomendasikan lokakarya, forum, dan proses pengambilan keputusan kolaboratif yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga dalam perumusan dan revisi kebijakan gratifikasi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada tentang peran kebijakan gratifikasi dalam pencegahan korupsi. Efek jera yang dirasakan sejalan dengan penelitian yang menekankan pada konsekuensi yang jelas untuk perilaku tidak etis (Villeneuve, Mugellini, and Heide 2020). Namun, tantangan dalam implementasi, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya, menggemakan kekhawatiran yang muncul di bidang penelitian antikorupsi yang lebih luas (Cowan and Yazdanparast 2021).

Dampak yang beragam, tingkat kesadaran yang berbeda-beda, dan tantangan kontekstual menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan langkah-langkah antikorupsi dengan konteks lokal. Studi ini memberikan wawasan khusus tentang dinamika kebijakan gratifikasi di Provinsi Jawa Barat, dengan menekankan pada area-area yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Temuan-temuan studi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, badan-badan pemerintah, dan lembaga-lembaga antikorupsi. Studi ini mengadvokasi pendekatan kolaboratif dan spesifik untuk perumusan kebijakan, dengan memasukkan perspektif pejabat desa

dan tokoh masyarakat. Selain itu, tantangan yang teridentifikasi menyoroti perlunya alokasi sumber daya dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk memperkuat implementasi kebijakan gratifikasi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti dinamika kebijakan gratifikasi dan perannya dalam pencegahan korupsi di lembaga pemerintah desa di Provinsi Jawa Barat. Analisis terhadap kebijakan yang ada menunjukkan adanya variasi dalam perumusannya, yang menekankan perlunya kerangka kerja yang terstandarisasi. Kesadaran dan pemahaman di antara para pejabat dipengaruhi oleh program pelatihan yang komprehensif dan strategi komunikasi yang efektif. Efek jera yang dirasakan dan dampak positif terhadap perilaku etis menggarisbawahi pentingnya kebijakan-kebijakan ini dalam membentuk perilaku.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti penegakan yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya, menjadi penghalang bagi efektivitasnya. Rekomendasi untuk perbaikan, termasuk standarisasi mekanisme penegakan, alokasi sumber daya, peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat, memberikan peta jalan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Studi ini tidak hanya memberikan wawasan khusus dalam konteks Jawa Barat, tetapi juga prinsip-prinsip umum untuk pengembangan kebijakan antikorupsi. Mengingat korupsi masih menjadi tantangan yang meluas, terutama di pemerintahan daerah, temuan-temuan studi ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi para pembuat kebijakan, badan-badan pemerintah, dan lembaga-lembaga antikorupsi. Ke depannya, pendekatan kolaboratif dan sesuai dengan konteks sangat penting untuk memperkuat implementasi kebijakan gratifikasi dan, lebih jauh lagi, memperkuat infrastruktur antikorupsi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. H. 1997. "Richard Pomfret Professor of Economics University of Adelaide Adelaide SA 5005, Australia."
- Anggono, Bayu Dwi, and Rofi Wahanisa. 2022. "Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia."
- Ashari, Hasan, and Trinandari Prasetyo Nugrahanti. 2021. "Household Economy Challenges in Fulfilling Life Needs during the Covid-19 Pandemic." *Global Business and Economics Review* 25(1):21–39.
- Aziza, Sofi Nur. 2022. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa." *JUSTICES: Journal of Law* 1(1):46–54.
- Bagaskoro, Ladito, Ardi Ferdian, Ridayani, Muhamad Romdoni, Febrianika Maharani, Ahdiyatul Hidayah, Celine Sitanggang, Jusnizar Sinaga, July Esther, Adwi Hadi, Ais Surasa, Hanuring Putri, Hanugrah Habsari, Herlina Manullang, Solehuddin, Nurini Aprilianda, Baren Sipayung, Muhamad Abas, Deaf Ramadhani, and Sada Pustaka. 2023. *PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*.
- Baidi, Ribut. 2019. "Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1(2).
- Budiman, Dana, Yusuf Iskandar, and Ana Yuliana Jasuni. 2022. "Millennials' Development Strategy Agri-Socio-Preneur in West Java." Pp. 315–23 in *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*. Atlantis Press.
- Christianto, Hwian. 2020. "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 7(3):421–42.
- Cowan, Kirsten, and Atefeh Yazdanparast. 2021. "Consequences of Moral Transgressions: How

- Regulatory Focus Orientation Motivates or Hinders Moral Decoupling." *Journal of Business Ethics* 170:115–32.
- Creswell, John W. 2013. "Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan Mixed (Edisi Keti)." Dewa, Zulfikar Rakita, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Neneng Yani Yuningsih. 2023. "DYNAMICS OF WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTING SECURITY, TEST, PUBLIC ORDER AND PROTECTION OF THE COMMUNITY POST 2019 ELECTIONS." *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33:85–109.
- Ince, Fatma. 2023. "Strategies to Combat Hidden Resignation and Disguised Unemployment." Pp. 258–73 in *Management Strategies and Tools for Addressing Corruption in Public and Private Organizations*. IGI Global.
- Iskandar, Yusuf, and Umi Kaltum. 2022. "Exploring Human Resource and Organizational Factors That Influence the Performance of a Social Enterprise." *Organizational Cultures: An International Journal* 22(2).
- Iskandar, Yusuf, and Tiara Sarastika. 2023. "Study of Socio-Economic Aspect and Community Perception on The Development of The Agricultural Area Shrimp Ponds in Pasir Mendit and Pasir Kadilangu." *West Science Journal Economic and Entrepreneurship* 1(01):28–36.
- Iswandi, Iswandi, and Bukhari Bukhari. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):797–806.
- Kim, Myung Ja, Choong-Ki Lee, and Michael W. Preis. 2020. "The Impact of Innovation and Gratification on Authentic Experience, Subjective Well-Being, and Behavioral Intention in Tourism Virtual Reality: The Moderating Role of Technology Readiness." *Telematics and Informatics* 49:101349.
- Leahy, T. n.d. "Teaching Them to Fish: Entrepreneurialist Approaches to Rural Development in South Africa." *Nova.Newcastle.Edu.Au*.
- Lewis, Blane D., and Adrianus Hendrawan. 2019. "The Impact of Majority Coalitions on Local Government Spending, Service Delivery, and Corruption in Indonesia." *European Journal of Political Economy* 58:178–91.
- Lim, T. C. 1999. "The Origins of Societal Power in South Korea: Understanding the Physical and Human Legacies of Japanese Colonialism." *Modern Asian Studies*.
- Sari, Ade Risna, Abdul Hamid, Ria Anggraeni Utami, Mia Amalia, Baren Sipayung, Men Wih Widiatno, and Ida Musofiana. 2023. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sipayung, Baren, Indah Dwiprigitaningtias, Rahmat Joko Nugroho, and Bartolomeus Bernard. 2023. "Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2(03):197–203.
- Sukmadi, Sukmadi. 2022. "The Pentahelix Model in Synergizing Sectors Tourism in West Java to Improve Local Economy." *International Journal of Social Science* 2(4):1873–78.
- Villeneuve, Jean-Patrick, Giulia Mugellini, and Marlen Heide. 2020. "International Anti-Corruption Initiatives: A Classification of Policy Interventions." *European Journal on Criminal Policy and Research* 26:431–55.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Vina Bella Rosita. 2022. "PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(11):1439–48.
- Zahoor, Shehla, Zahid Ullah, and Syed Raza Shah Gilani. 2023. "CORRUPTION AND THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LDCS): AN ANALYSIS OF THE CAUSES, SCOPE, AND IMPACT OF CORRUPTION ON THE LDCS." *Pakistan Journal of Social Research* 5(02):393–401.